El-Jughrafiyah
Nama Penulis
Volume, 05, Issue 01, Tahun 2025

Pengembangan Wilayah Desa Wisata Bahari Berbasis Masyarakat

Sirajul Fuad Zis[1], Yonariza[1], Hery Bachrizal Tanjung[1], Ernita Arif, Almegi[2]

[1] Program Doktor Studi Pembangunan, Universitas Andalas
[1,2] Program studi Pendidikan Geografi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: 2231622008_sirajul@student.unand.ac.id

ABSTRACT. *The potential of the area in the maritime area can be utilized by the community as a tourist attraction. One of the objects of development that can increase community income is tourism that is managed directly by the community. This research aims to utilize the area as a tourist attraction, which can improve the people's economy with marine tourism. The novelty of this research is that the potential for regional development by the community can be managed for strong village growth. The research method is descriptive qualitative with primary data from 9 informants by collecting in-depth interviews and secondary data from documents related to marine tourism issues. The research was conducted in three locations, namely Amping Parak Tourism Village in Pesisir Selatan Regency, Teluk Buo Tourism Village in Padang City, and Apar Tourism Village in Pariaman City, West Sumatra Province, Indonesia. The results of the study found that the development of a community-based marine tourism village area requires maritime resource land status, open leadership, and stakeholders who can help develop the tourism village.*

Keywords: *Regional Development, Tourism Village, Maritime*

ABSTRAK. Potensi wilayah di kawasan bahari dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai objek wisata. Salah satu objek pembangunan yang dapat menambah pendapatan masyarakat yakni wisata yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk pemanfaatan wilayah menjadi objek wisata, yang dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan wisata bahari. Kebaruan penelitian ini terdapat pada potensi pengembangan wilayah oleh masyarakat dapat dikelola untuk pertumbuhan desa yang kuat. Metode penelitian yakni kualitatif deskriptif dengan data primer dari 9 informan dengan pengumpulan wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen yang berkaitan isu wisata bahari. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yaitu Desa Wisata Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Wisata Teluk Buo di Kota Padang, dan Desa Wisata Apar di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengembangan Wilayah Desa Wisata Bahari berbasis Masyarakat dibutuhkan Status Lahan Sumber Daya Bahari, Kepemimpinan yang Terbuka, dan Stakeholders yang dapat membantu pengembangan desa wisata.

Kata kunci: Pengembangan Wilayah, Desa Wisata, Bahari

PENDAHULUAN

Kajian geografi pariwisata adalah objek wisata dan wisatawan sebagai konsumen obyek wisata tersebut, selanjutnya dilakukan analisis untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat interaksi antara wisatawan dengan lingkungan objek wisata (Sutedjo and Murtini 2023). Sebagai kajian yang mengantarkan pada pendekatan pengembangan wilayah untuk pariwisata. Sesuai dengan tujuan pembangun berkelanjutan, isu geografi wisata sangat relevan menjawab tantangan global.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan serangkaian target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh penghuni bumi (SDGs Indonesia 2024). Ada 17 tujuan SDGs yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi saat ini. Salah satunya adalah tujuan 14 pembangunan

berkelanjutan dari segi ekosistem laut, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas 2017). Tujuan ini berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya lautan, laut, dan ekosistem pesisir untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan (UB 2023). Pariwisata telah menjadi industri potensial baru bagi wilayah-wilayah yang mengalami penurunan ekonomi (Mendlinger, Miyake, and Billington 2009).

Wilayah pesisir dan laut di wilayah Indonesia meruapakan potensi pariwisata alam yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, apabila dikelola dengan baik. Dengan menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa pariwisata adalah sektor yang paling efektif untuk meningkatkan devisa negara. Salah satu alasannya adalah karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata tersedia di dalam negeri. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya tersebut mencakup letak geografis, luas wilayah, serta keragaman sumber daya alam, budaya, kuliner, dan kekayaan lainnya yang ada di Indonesia. Sumber daya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Saat ini, Indonesia memiliki banyak destinasi eksotis dan menakjubkan. Selain wisata alam yang beragam, wisata budaya dan sejarah di Indonesia juga sangat menarik. Hal ini disebabkan oleh ratusan suku budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Rahma 2020).

Menariknya wisata alam di Indonesia terbagi menjadi wisata flora dan fauna. Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia, dengan lebih dari 18% dari total terumbu karang dunia. Raja Ampat di Papua Barat adalah salah satu lokasi terbaik untuk menyelam, dengan keanekaragaman biota laut yang luar biasa dan visibilitas hingga 30 meter pada siang hari. Keanekaragaman fauna juga dapat ditemui di tempat-tempat seperti Ujung Kulon, Pulau Komodo, dan berbagai kebun binatang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam upaya mengelola sumber daya alam, titik kedatangan wisatawan juga mempengaruhi jumlah wisatawan asing dan domestik. Oleh karena itu, pemerataan titik kedatangan pengunjung perlu diperluas agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati oleh semua orang (Rahma 2020)

Adapun beberapa kelemahan dari wisata pantai ini adalah manajamen (pengelolaan) kawasan pantai yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurang terawat nya kawasan wisata pantai (Handayani et al. 2021), kelemahan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah dan swasta tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kelemahan ini yang menjadi perputaran ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan pariwisata. Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat mendobrak kelemahan tersebut untuk dijadikan sebagai perwujuduan ekonomi berkelanjutan dari konteks pariwisata.

Sementara itu sebagai upaya peningkatan pengelolaan dengan stakeholder selaku pengelola obyek wisata sebaiknya lebih gencar melakukan kerja sama dengan pihak luar, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Upaya promosi sebaiknya juga harus lebih gencar dilakukan. Pengelola dapat menggunakan media internet, membuat brosur wisata, dan juga menggunakan agen perjalanan wisata untuk melakukan promosi. Masalah konflik internal antar sesama masyarakat perlu segera diselesaikan. Untuk tempat penginapan, masyarakat setempat juga sebaiknya perlu mengembangkan dan mempersiapkan rumah mereka untuk dijadikan sarana homestay bagi wisatawan yang berkunjung (Handayani et al. 2021).

Pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada kemampuan bisnis dari sektor swasta. Tanpa dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, pengembangan bisnis pariwisata yang dilakukan oleh pihak swasta tidak dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula, pengembangan pariwisata yang hanya dikelola oleh pemerintah tanpa melibatkan pilar lainnya akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan investasi dan modal untuk pengembangan pariwisata tersebut (Rusyidi and Fedryansah 2019). Sebagi bentuk dukungan kepada masyarakat, punya kesempatan untuk mengelola pariwisata berbasis masyarakat.

Community-Based Tourism (CBT) adalah pengembangan pariwisata yang mengajak masyarakat lokal untuk terlibat dan diberdayakan dalam mengelola serta mengembangkan destinasi wisata. Fokus utama konsep ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan setempat. Pengelolaan pariwisata yang efektif adalah ketika sektor pariwisata mampu memberikan keuntungan bagi semua lapisan masyarakat (Triyanti et al. 2020).

Pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat merupakan isu strategis dalam pengembangan pariwisata saat ini. Strategi ini dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat. Pada prinsipnya, CBT adalah konsep penting yang muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap model pembangunan kepariwisataan konvensional yang sering mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata di daerah mereka. Pembangunan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik elemen fisik maupun non-fisik seperti tradisi dan budaya, yang merupakan unsur utama penggerak kegiatan wisata itu sendiri (Sunaryo 2013).

Menurut Hatton, prinsip *Community Based Tourism* (CBT) dapat dibagi menjadi empat kategori: sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Prinsip sosial berkaitan dengan pemberian wewenang kepada komunitas untuk memberikan izin, mendukung, membangun, dan mengelola kegiatan pariwisata di wilayah mereka. Prinsip ekonomi terkait dengan sistem distribusi keuntungan yang dihasilkan dari pengembangan industri pariwisata. Berdasarkan pendapat ini, terlihat bahwa CBT sangat berbeda dari pengembangan pariwisata pada umumnya (pariwisata massal). Dalam CBT, komunitas lokal berperan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata dengan tujuan utama meningkatkan standar kehidupan masyarakat (Hatton 1999).

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang didasarkan pada potensi objek wisata dan kesiapan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Pertama, merancang berbagai fasilitas wisata seperti toko-toko suvenir dan makanan yang menjual oleh-oleh khas daerah, baik berupa makanan maupun kerajinan tangan lainnya. Kedua, meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan kompetensi masyarakat dalam mengembangkan desa sesuai dengan prinsip CBT yang sepenuhnya melibatkan masyarakat. Kegiatan CBT hanya dapat berjalan jika didukung oleh orang-orang yang kompeten. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan kegiatan pembangunan desa yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal sebagai pemegang kepentingan.

Gambar 1. Pasar Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sumber: www.alliedmarketresearch.com)

Berdasarkan wilayah, Asia-Pasifik diprediksi akan mendominasi pasar dengan pangsa terbesar selama periode perkiraan (2023-2032). Dalam pasar pariwisata berbasis komunitas, Asia-Pasifik merupakan wilayah terbesar dan salah satu yang berkembang paling cepat. Kehadiran populasi milenial yang besar, bersama dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan perbaikan infrastruktur, telah menyebabkan pertumbuhan signifikan dalam pangsa pasar wisatawan keluar dari wilayah Asia-Pasifik. Selain itu, Asia-Pasifik terkenal dengan keragaman budaya yang kaya dan lokasi wisata yang menarik. Negara-negara dengan konsentrasi perjalanan keluar tertinggi di antara yang memiliki pendapatan rumah tangga lebih tinggi adalah China, Jepang, Australia, dan India. Lebih dari 73% dari semua perjalanan keluar berasal dari rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari $10.000 per tahun, menurut data pendapatan rumah tangga. Hal ini mungkin terkait dengan ekonomi Asia-Pasifik yang berkembang pesat dan arus masuk peluang kerja baru. Faktor-faktor yang disebutkan di atas telah meningkatkan pertumbuhan pasar pariwisata berbasis komunitas di Asia-Pasifik (Allied Market Research 2023). Sementara itu di Indonesia telah berkembang konsep pariwisata berbasis masyaarakat dilaksanakan oleh masyarakat lokal, sehingga berdasarkan data BPS Kunjungan Wisata Mancanegara 24,85% yang masuk ke Indonesia dan Wisatawan Nasional 19,78% per juni 3 Juni 2024. Gambaran kunjungan wisatawan yang masuk membawa dampak meingkatkan ekonomi masyarakat lokal mulai dari kunjungan pariwisata, homestay, kuliner, souvenir dari kearifan lokal Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum begitu dipandang dapat mendatangkan berbagai manfaat, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata (Suganda 2018). (Suansri 2003) menguatkan definisi Community Based Tourism (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. Community Based Tourism (CBT) merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Penelitian Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Perkampungan Wisata Sousu, Kabupaten Wakatobi) (Hidrawati et al. 2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa isu-isu strategis paling penting dalam pengembangan pariwisata di Sousu meliputi: peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pendanaan untuk mendukung usaha pariwisata komunitas, meminimalkan masalah relokasi pemukiman komunitas dan abrasi pantai, serta meningkatkan daya tarik pariwisata dan promosi pariwisata

Penelitian selanjutnya membahas Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif di Kampung Malaumkarta , Papua Barat (Triyanti et al. 2020). Temuan menunjukkan bahwa daya dukung efektif di kawasan Kampung Malaumkarta adalah 57 pengunjung per hari, dengan nilai pengganda antara 1,14 hingga 1,64. Potensi kawasan pesisir Kampung Malaumkarta yang beragam, baik dari segi alam maupun budaya, mampu memberikan dampak ekonomi langsung, tidak langsung, dan berkelanjutan sebesar Rp5.179.031.667 per tahun. Besarnya dampak ekonomi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan konsep pengembangan ekowisata bahari yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung efektif. Penelitian ini fokus mengkaji terkait pengembangan wilayah wisata bahari berbasis masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan.

METODE

Penelitian ini mengkaji pengembangan wilayah desa wisata bahari yang berpotensi pengembangan objek wisata bahari. Metode penelitian kualitatif digunakan (Afrizal, 2017), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi lapangan, dan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan dokumen, laporan, dan artikel tentang Ekowisata Bahari Berkelanjutan. Informan kunci dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa/Walinagari, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata Kabupaten, Pemandu Wisata, Agen Perjalanan, Pakar Pengembangan, Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang telah dianalisis akan digunakan untuk

menyusun model pengembangan ekowisata bahari yang berkelanjutan melalui komunikasi konvergen (Rogers, Everett M., 1981). Sementara itu, diskusi kelompok terarah (FGD) digunakan untuk mendiskusikan Analisis Pendukung dan Penghambat Pengembangan Ekowisata Bahari Melalui Komunikasi Konvergen dengan para pedagang dan wisatawan. Penelitian dilaksanakan pada Januari-Maret 2025.

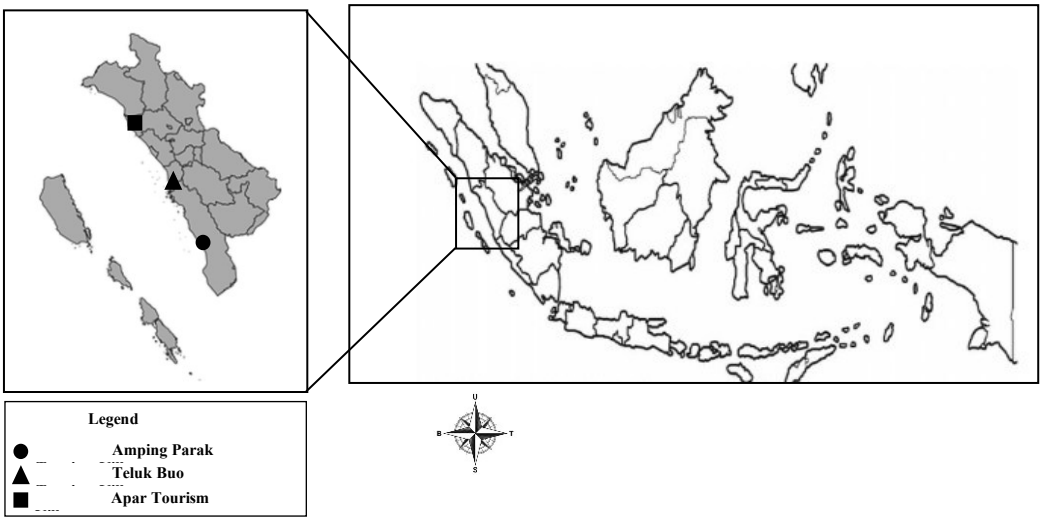

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Sumatera Barat, Indonesia

Lokasi penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu Desa Wisata Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Wisata Teluk Buo di Kota Padang, dan Desa Wisata Apar di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ketiga lokasi ini memiliki potensi wisata bahari yang besar, khususnya model wisata bahari berbasis masyarakat yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Ketiga lokasi ini memiliki potensi sumber daya alam, kearifan lokal, kegiatan ritual sosial dan budaya bahari, serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Ekowisata bahari yang berkelanjutan dan populasi masyarakat lokal merupakan kekuatan pendorong di ketiga lokasi tersebut.

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak antara 0°54' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 98°36' hingga 101°53' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 42.012,89 km2 , dengan luas wilayah perairan laut 37.355,46 km2 dan panjang pantai sekitar 2.285,96 km, termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Mentawai. Provinsi ini mencakup 185 pulau-pulau kecil, dengan mayoritas (98 pulau) terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara administratif, Sumatera Barat terbagi menjadi 19 kabupaten/kota, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah wilayah administratif terbesar, mencakup 6.010 km² (14,21% dari provinsi), sementara Kota Padang Panjang adalah yang terkecil, yaitu 23 km² (0,05%). Wilayah ini dibagi lagi menjadi 179 kecamatan, 230 kelurahan, 803 nagari, dan 126 desa. Sumatera Barat berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah utara, Bengkulu di sebelah selatan, Samudra Hindia di sebelah barat, serta Riau dan Jambi di sebelah timur (BAPPEDA Sumbar, 2021). Topografi Sumatera Barat sangat beragam, meliputi pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ketinggian wilayah di provinsi ini bervariasi, mulai dari daerah pantai dengan ketinggian 0 meter hingga daerah pegunungan yang mencapai lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), perairan laut Sumatera Barat diperluas hingga 200 mil, sehingga total luas wilayah perairannya mencapai 186.580 km2. Kondisi laut ini memberikan potensi perikanan laut yang lebih besar bagi Sumatera Barat dibandingkan dengan perikanan lepas pantai dan lautan. Wilayah ini juga termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - 572 yang meliputi Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda. Potensi perikanan dan kelautannya, baik di laut maupun perairan umum, sangat besar untuk mendukung pengembangan ekonomi produktif (Liu et al., 2023), konservasi,

dan pembangunan di masa depan (BAPPEDA Sumbar, 2021). Hutan mangrove di Sumatera Barat mengalami tekanan yang signifikan akibat eksploitasi langsung dan tidak langsung, terutama melalui konversi menjadi area pemukiman, perkebunan, tambak, dan penggunaan lainnya. Upaya pelestarian berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove secara ekologis, penanaman kembali area yang terdegradasi, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan, seperti budidaya ikan dan kepiting bakau (BAPPEDA Sumbar, 2021). Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di berbagai kabupaten. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu di Kabupaten Pesisir Selatan, Pulau Kasiak dan Pulau Talua di Kabupaten Pasaman Barat, Pulau Saibi dan Pulau Saliguma di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta kawasan Gasan di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu fokus utama konservasi adalah penyu yang menjadi perhatian dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian dunia terhadap konservasi dan keberlanjutan laut telah meningkat. Pemahaman tentang hubungan antara manusia dan laut sangat penting untuk mencapai target konservasi, keberlanjutan laut, dan kesejahteraan masyarakat (McRuer et al., 2025). Pilihan pendekatan konservasi atau pengelolaan tertentu bergantung pada elemen kontekstual seperti hasil konservasi atau pengelolaan yang diinginkan, hak kepemilikan sumber daya, dan tata kelola di wilayah tertentu, dan efektivitas pendekatan ini dalam melestarikan dan memulihkan alam sangat bergantung pada konteksnya (Fermepin et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Status Lahan Sumber Daya Bahari

Pemanfaatan sumber daya bahari membutuhkan kepastian status lahan sebagai upaya kejelasan dalam mengelolah wilayah. Hal ini disebut sebagai Rigt Holder (Pemegang Hak) atas status lahan yang dikelola apakah milik masyarakat, kaum atau kepemilikan pribadi. Sebelum pengembangan wilayah Desa wisata dibutuhkan kekuatan hukum yang jelas sebelum berjalan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Desa Wisata Amping Parak bahwa tokoh adat yang menyerahkan status pemanfaatan tanah kepada Kelompok Sadar Pariwisata. Sementara itu pada Desa Wisata Apar, status penggunaan lahanya diserahkan oleh desa tersebut.

Berbeda dengan Desa Wisata Teluk Buo di Padang, status kepemilikan lahan di tepian pantainya adalah milik perseorangan, sementara lahan mangrovenya adalah kawasan lurah namun tetap dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata yang pada substansinya adalah masyarakat. Hal ini penting diperjelas pada saat pengembangan wilayah, karena berhubungan dengan masa depan objek wisata kedepannya. Apabila adanya konflik, ancaman yang dapat terjadi adalah ketidakberlanjutan wisata bahari.

Gambar 2. Wilayah Ekowisata Desa Amping Parak, Pesisir Selatan

Kepemimpinan yang Terbuka

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan, terutama di tengah tantangan kompleks yang melibatkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seorang pemimpin yang baik dan bersifat terbuka tidak hanya menjadi pengarah visi tetapi juga penggerak kolaborasi, inspirator, dan fasilitator bagi berbagai pemangku kepentingan.

komunikasi terbuka menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Keterbukaan dalam komunikasi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kepercayaan yang kuat. Kepercayaan ini sangat penting untuk keberhasilan proyek, karena memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan peningkatan partisipasi semua pihak yang terlibat.

Gambar 3. Konservasi Penyu di Desa Wisata Apar, Pariaman

Dalam konteks wisata bahari, keterbukaan pemimpin terhadap masukan, ide, dan kritik menjadi fondasi untuk pengambilan Keputusan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pola komunikasi yang diterapkan oleh Ketua LPPL di Desa Wisata Amping Parak menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam menciptakan keterbukaan informasi di antara anggota kelompok. Keterbukaan ini menjadi modal utama bagi ketua dalam menyampaikan pesan dan informasi kerja, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota. Ketua LPPL juga menciptakan ruang diskusi bagi semua pemangku kepentingan untuk berbagi gagasan dan menyampaikan aspirasi sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dan calon mitra yang ingin diajak bekerja sama dalam isu lingkungan untuk pengembangan wisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Kemampuan komunikasi oleh pemimpin dalam mengayomi anggota, merupakan peran penting yang dapat memengaruhi untuk bekerjasama mengembangkan potensi ekowista bahari. Kemampuan komunikasi dibuktikan dengan berjalannya pemanfaatan sumber daya alam yang ada Bersama Masyarakat lokal Dan masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan wisata bahari.

Kepemimpinan yang baik dan terbuka adalah elemen kunci dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Dengan mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan kolaborasi, seorang pemimpin mampu memaksimalkan potensi wisata bahari sekaligus melindungi ekosistem laut. Kepemimpinan semacam ini tidak hanya menghasilkan destinasi wisata yang menarik tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sementara itu faktor kepemimpinan yang kurang dapat membuat pariwisata bahari terbengkalai seperti yang terjadi di Desa Wisata Apar, Pariaman.

Stakeholders Pengembangan Wilayah Desa Wisata

Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, perlu adanya penerapan prinsip kemitraan yang inklusif guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17. Hal ini mencakup kolaborasi, pertukaran gagasan inovatif, serta dukungan sumber daya yang lebih luas. Dalam konteks ini, pengelola pariwisata perlu membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Lembaga Pengelolaan Pariwisata Lokal (LPPL), sebagai organisasi yang memiliki fokus pada pelestarian lingkungan, telah memulai inisiatif kerja sama dengan berbagai pihak eksternal/stakeholders Dengan penggunaan komunikasi yang tepat dan terarah. Kelompok ini telah membangun jaringan relasi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi nirlaba. Jaringan ini terbentuk melalui hubungan baik yang telah terjalin sebelumnya, terutama melalui perkenalan dengan individu-individu kunci di lembaga-lembaga tersebut. Jaringan relasi yang solid ini menjadi modal utama dalam upaya pengembangan pariwisata, memungkinkan LPPL memperoleh dukungan baik berupa sumber daya manusia maupun material. Kemampuan LPPL dalam menjalin kerjasama eksternal telah membawa dampak positif bagi pengembangan kawasan ekowisata konservasi Penyu Ampiang Parak, menghasilkan berbagai bentuk pembangunan yang konkret. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran penting Haridman dan Yendri dalam membangun dan memelihara hubungan dengan sejumlah relasi.

Ini dibuktikan Sehubungan dengan adanya potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh kelompok LPPL. Maka dari itu LPPL menggelar kerjasama bersama stakeholders dalam pengembangan Ekowisata. Konteks pegembangan pertama dilakukan saat penanaman pada tahun 2016, Kelompok LPPL mendapat bantuan penanaman pohon cemara laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari bantuan yang diberikan oleh KKP Pertumbuhan cemara lauy yang ditanam di kawasan pantai Ampiang Parak dapat bertumbuh dengan baik diawasi oleh LPPL dalam merawat tumbuhan vegetasi.

Pada tahun 2015-2017, Kelompok ini juga mendapatkan pendanaan dari perusahaan PLN dan Kominfo berupa bantuan untuk pendanaan penangkaran konservasi penyu, dermaga penyeberangan, papan penunjuk, wc 2 unit, sekretariat, pondok tamu, boat, homestay, honda becak, cctv, komputer dan beberapa bantuan lainnya. Setelah itu kelompok LPPL yang didirikan oleh Haridman, juga mendapatkan perhatian internasional, yakni pendampingan dari Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dari Jerman pada tahun 2016, 2017 dan 2018, tentang Ekowisata Berbasis pengurangan risiko bencana sampai kepada proses pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Ampiang Parak (FPRB), tujuan FPRB ini menjadi bagian yang akan memandu masyarakat dalam persoalan mitigasi bencana di nagari.

Pada tahun 2019, kelompok nelayan ini juga mendapat bantuan dari kerjasama Kementrian Kelauatan dan Perikanan, dengan ASB (pendanaan dari Jerman) untuk progam ekowisata berbasis bencana, sehingga kelompok nelayan ini mendapatkan bantuan dan pelatihan bersama dengan dibentuk juga Kelompok Siaga Bencana (KSB), termasuk bantuan alat selam dan alat telekomunikasi walki talki atau kontek-kontek. Selanjutnya LPPL telah berhasil membangun kerjasama PLN Peduli dengan nilai Rp. 227.040.059 untuk Pengembangan Konservasi Penyu Ampiang Parak Kecamatan Sutera Pada November 2019. Kerjasama yang juga dijalin dalam pengembangan Ekowisata bersama BPSPL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. PLN, Arbaiter Samariter Bund dan Yayasan Gajah Sumatera.

Pada Desa Wisata Teluk Buo, Pokdarwis fokus untuk melalukan penguatan kelembagaan melalui Pelatihan management kewisataan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Padang serta mulai merintis ticketing wisata. Tahun 2023 Pokdarwis melakukan pengembangan kegiatan berupa inisiasi pahlawan cilik mangrove yang berwenang menularkan nilai cinta lingkungan ke wilayah sekolah di sekitar Bungus Teluk Kabung.

Gambar 4. Kawasan Mangrove Teluk Buo, Padang

Kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta Pokdarwis menciptakan sistem kegiatan pengembangan inovasi sosial melalui terobosan penggunaan sensor pemantauan kualitasas perairan yang mencakup pemantauan variabel ph salinitas, oksigen, 2 pasang BOD-COD (didalam dan diluar keramba) yang terkoneksi ke aplikasi E-Fishien. Terpasang 5 sensor yang memiliki elemen control perikanan dengan pendeteksi keterlaurutan terkoneksi dengan turbin otomatis. Serta 2 pasang sensor BOD-COD ditarik 500 meter diluar keramba dekat dengan jalur mobilitas kapal besar untuk mendeteksi resiko cemaran perairan. Sensor ini berhasil meningkatkan perbaikan terhadap budidaya perikanan sebesar 49% peningkatan bobot hasil panen.

Selanjutnya Desa Wisata Teluk Buo juga bekerja sama dengan UNP & PNJ yang dilakukan di kelompok nelayan Pokdakan Teluk Buo Indah dengan mendapingi melakukan inovasi pengembangan sistem keramba jaring apung dengan penerapan 5 sensor terpasang di dalam keramba dan 2 sensor di jalur perairan lalu lalang kapal yang terkoneksi melalui aplikasi E-Fishien. Kerjasama Desa Wisata teluk buo dengan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Provinsi SUMBAR, Akademi Usaha Perikanan, Pertamina International Shipping dan PLTU Teluk Sirih serta Kunjungan 4 institusi dari berbagai institusi Poltekpel SUMBAR, UNP, serta PLTU Teluk Sirih

Pada Desa Wisata Apar Pariaman, Kerjasama yang terjadi antara pertamina dana permerintah setempat dalam melakukan penanaman bersama bibit mangrove pada sekitaran tempat wisata konservasi penyu, ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran melestarikan lingkungan. Desa wisata apar juga bekerjasama dengan mahasiswa KKN Universitas Andalas dalam menyuarakan stop bullying yang berdapak buruk bagi mental seseorang. Kerja sama juga terjadi dengan pihak-pihak berkepentingan dalam menyediakan pendanaan untuk membantu pengembangan desa wisata apar, berupa outlet dagang, toilet, papan pengumuman, dan alat-alat lain yang dibutuhkan. Kerjasama Desa Wisata Apar dengan bank mandiri, BSI, pertamina, jamkrindo, bukit asam, jasamarga, pemprov sumbar, UGM, KKP, kemenprarekrav, kementrian desa, Bank Indonesia, Unand, ISI padang Panjang, UNP.

Pembahasan

Lima Destinasi Super Prioritas (DSP) yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebar di lima provinsi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari barat, tengah, hingga timur. Destinasi tersebut mencakup Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara. Masing-masing destinasi memiliki potensi wisata yang besar dengan keunikan dan daya tarik tersendiri, namun masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat dimaksimalkan. Empat dari lima Destinasi Super Prioritas yang ditetapkan oleh

Kementerian Pariwisata merupakan Ekowisata Bahari, tiga destinasi Pantai dan Laut dan satu destinasi Danau.

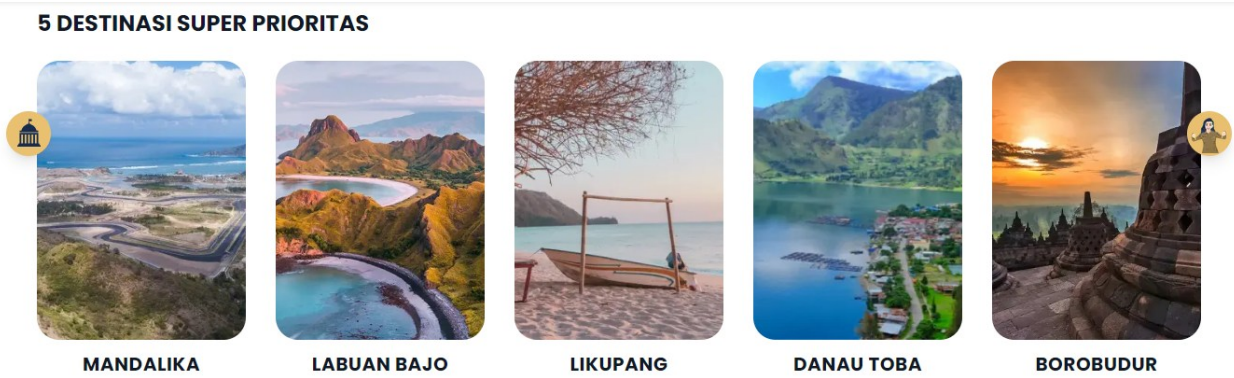

Sumber Foto : www.kemenparakraf.go.id

Bicara pembangunan lima Destinasi Super Prioritas ini dilatarbelakangi karena tren Ekowisata Bahari di Bali masih menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Sehingga Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan destinasi ikut melejit yang diyakini mampu mendongkrak industri pariwisata Indonesia di masa yang akan datang. "Ini adalah keputusan yang sudah diambil di level tertinggi. Presiden bilang bahwa kalau membangun fokus, cari lima yang berpotensi menjadi 'Bali Baru'. Kalau lima destinasi ini sudah selesai kita persiapkan, kita perluas lagi," ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam sebuah wawancara pada April 2022.

Sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas wisata bahari sekaligus menciptakan lapangan kerja, pemerintah berencana mengembangkan sektor pariwisata laut yang memiliki nilai tinggi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024, Sandiaga Uno, menegaskan bahwa pengembangan ini bertujuan untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan wilayah desa sebagai destinasi wisata bahari tidak hanya bergantung pada potensi alam yang tersedia, tetapi juga pada kapasitas sosial masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan status lahan. Dalam konteks ini, geografi pariwisata bukan sekadar ruang fisik, tetapi juga merupakan arena sosial yang sarat dengan kepentingan, hak milik, dan norma adat. Ketidakjelasan atau konflik status lahan sering menjadi hambatan struktural yang krusial bagi pengembangan wisata berbasis masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan aktor lokal yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan legitimasi sosial yang tinggi. Sosok ketua atau pemimpin yang dipilih oleh masyarakat bukan hanya simbol formal, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pihak eksternal.

Komunikasi yang terbuka dari pemimpin terhadap masyarakat terkait realitas dan tujuan pengembangan wilayah menjadi kunci dalam membangun *sense of ownership* dan legitimasi kolektif terhadap proyek wisata yang dirancang. Lebih jauh, kemampuan pemimpin dalam membingkai narasi pengembangan wilayah sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan juga sangat strategis. Hal ini tidak hanya memperkuat motivasi partisipasi masyarakat, tetapi juga mengarahkan proyek wisata pada model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Strategi komunikasi yang dilakukan harus bersifat partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial-budaya yang ada, agar dapat menciptakan kesepahaman dan kerja sama lintas aktor yang harmonis. Tentu saja dengan memerhatikan relasi dengan stakheholder untuk pengembangan wilyah destinasi.

Kajian penelitian terdahulu Pada tahun 2022 penelitian yang membahas tentang Inovasi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Studi Kasus Pada Kelurahan Sukolilo Baru Dan Kelurahan Kandangan Surabaya (Wardaya et al. 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi

wisata di Kelurahan Sukolilo Baru dan Kandangan memerlukan inovasi untuk pengembangannya. Dengan menggunakan analisis SWOT yang dilengkapi dengan strategi, diharapkan dapat mendukung realisasi pengembangan wisata di kedua kelurahan ini. Berdasarkan potensi yang ada di Kelurahan Kandangan dan Sukolilo Baru serta hasil analisis SWOT, dirancanglah *grand design* yang mencakup upaya pengembangan seperti pembuatan papan nama, penataan lokasi wisata, kerjasama dengan warga setempat, dan penyediaan tempat sampah.

Masih pada tahun yang sama, berikutnya penelitian Pengembangan Wisata Warakas berbasis Edu Eco Wisata sebagai Penunjang Kampung Bahari Nusantara (Prasetyo, Setyaningrum, and Prasetya 2022). Hasil analisis SWOT mengungkapkan bahwa akses ke lokasi Wisata Warakas di Kawasan Mengare sangat sulit dijangkau. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperlebar jalan, menyediakan penunjuk arah, dan memasang lampu penerangan jalan. Berdasarkan riset pasar, beberapa fasilitas tambahan diperlukan di Wisata Warakas. Dengan adanya tambahan lahan seluas 1,5 hektar yang akan dihibahkan oleh Lantamal III, Wisata Warakas dapat diperbaiki dan dikembangkan dengan lebih baik.

Sementara itu masih pada tahun yang sama Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pendekatan Pengembangan Pariwisata Desa Bahari Iii Kabupaten Buton Selata (Wijaya et al. 2022). Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat dalam menerapkan konsep Community Based Tourism (CBT). Observasi yang dilakukan mengidentifikasi beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan input untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bahari III, termasuk potensi geografis, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Potensi-potensi ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan pariwisata berbasis masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Implementasi ini dapat dilakukan dengan dukungan dari komunitas yang ada di Desa Bahari III, namun masih memerlukan penguatan kapasitas lebih lanjut. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi meliputi waktu, infrastruktur, dan promosi.

Harapan baru bagi masyarakat pesisir, untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekowisata bahari dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam laut dan pulau sebagai destinasi pariwisata baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Lantas apa saja yang menjadi daya tarik wisata bahari? Pertama, daya tarik keindahan pesisir yang bersih, indah dan lestari dengan. Kedua, daya tarik wisata atraksi yang ditawarkan (seperti konservasi penyu, banana boat, surfing, diving, snorkeling, jelajah hutan mangrove dengan perahu dan atraksi lainnya) dengan menggunakan konsep konservasi (Tindakan yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam, baik yang bersifat alami maupun hasil buatan manusia). Ketiga, keamanan, kenyamanan dan keramahtamahan dalam menyambut wisatawan.

Kenapa wisatawan mengunjungi Bali? Karena terdapat destinasi yang lengkap Wisata alam (pantai, gunung, dan sawah), wisata budaya, wisata modern (*night life, beach club*), Wisata kesehatan (yoga, spa, dan retreat spiritual) yang didukung oleh keramahtamahan masyarakat lokal. Pembangunan Ekowisata Bahari adalah suatu potensi yang dapat dimanfaatkan pengelolaanya berbasis masyarakat, yang menguntungkan masyarakat pesisir sebagai skala prioritas paling tinggi. Apa jadinya kalau investor yang masuk ke pembangunan ekowisata bahari? Masyarakat menjadi pekerja di wilayah mereka sendiri, tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk arah terbaik untuk mewujudkan Ekowisata Bahari.

Permasalahan Ekowisata Bahari di Sumatera Barat, khususnya yang dikelola masyarakat belum banyak yang menuai keberhasilan, bahkan miris terhadap fenomena perilaku pemalakan di wilayah pesisir pantai, seperti kasus pemalakan oleh pemilik oknum warung kepada wisatawan di Pantai Padang, Pantai Pasir Jambak yang viral. Artinya kesadaran masyarakat terhadap potensi parwisata mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memaksimalkan hospitality (sikap ramah kepada tamu) belum dipahami. Sehingga menghasilkan perilaku oknum yang menginginkan instan mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan menggertak dan menggangu kenyaman wisatawan. Wisatawan tidak akan kembali, jika hal tersebut menjadi pengalaman wisata yang buruk. Masih ada permasalahan mental yang terjadi, para pemalak memanfaatkan agenda wisatawan untuk

keuntungan pribadi bukan berbasis pengelolaan masyarakat. Basis wisata yang pengelolaan dari masyarakat, mestinya bersatu dalam satu kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis) untuk mengelola wisata. Boleh dan sah saja meminta tiket masuk secara resmi, dengan harga tiket yang terjangkau sesuai dengan atraksi Ekowisata Bahari yang ditawarkan berkoordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten/kota setempat untuk Pendapat Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan dan kebijakan daerah, sementara itu nilai sosial-ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkat serta memiliki lingkungan yang terjaga.

Pembangun Ekowisata Bahari, dapat menggunakan pendekatan konsep pembangunan berkelanjutan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Tiga pilar ini apabila berjalan seimbang akan mewujudkan berkelanjutan pada aspek Ekowisata Bahari. Oleh karena itu, diperlukan kajian multidisiplin untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan solusi yang tepat dalam pengelolaannya. Destinasi wisata bahari dari wilayah Sumatera Barat tidak masuk dalam ketegori destinasi Super Prioritas? Kenapa? Ada apa? Ada wisata Kawasan Mandeh yang punya potensi besar untuk pengembangan, dan beberapa destinasi Ekowisata Bahari yang di Sumatera Barat seperi Desa Wisata Amping Parak: Konservasi Penyu, Desa Wisata Teluk Buo dan Desa Wisata Apar. Ada apa? apa permasalahannya? salah strategi apa? kebijakan apa yang masih kurang untuk mendukung Kawasan Mandeh tidak dilirik? Pertanyaan-pertanyaan tajam untuk pemangku kepentingan, dalam konteks ini tentu saja ditujukan untuk pemerintah Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko yang mengusung misi urutan keenam saat kampanye yakni meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Misi ini bersifat masih bersifat umum, masih sulit untuk ditafsirkan apakah ekowisata bahari masuk dalam kerangka visi yang dimaksud, karena berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Perda Sumbar No.3 Tahun 2014) pada masa kepemimpinan Gubernur yang sama dan Wakil Gubernurnya Audy Joinaldy. Visi pembangunan pariwisata provinsi yang tertuang dalam dokumen tersebut yaitu terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di Wilayah Indonesia Bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Penetapan visi ini menurut pandangan peneliti masih keliru, karena potensi wisata alam yang ada di Sumatera Barat tidak dimasukkan dalam visi termasuk di dalamnya potensi wisata bahari. Masih membungkus visi berbasis agama dan budaya. Dasar kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendukung Pembangunan Ekowisata Bahari di Sumatera Barat, bentuk keseriusan membangun harapan baru dalam mensejahterakan masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wilayah bahari sebagai objek wisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat apabila dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat membutuhkan beberapa faktor pendukung utama, yaitu kejelasan status lahan sumber daya bahari, kepemimpinan yang terbuka, serta dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berperan dalam mendorong keberlanjutan dan kemajuan desa wisata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) melalui pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.

REFERENSI

Allied Market Research. 2023. "Community Based Tourism Market Size, Share, Competitive Landscape and Trend Analysis Report, by Age, by Traveler Type, by Sales Channel : Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032." *Allied Market Research*. Retrieved (https://www.alliedmarketresearch.com/community-based-tourism-market-A223024).

Gubernur Sumatera Barat. 2014. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2025*. Vol. 85.

Handayani, Melia, Syifa Fajar Maulani, Rubby Rahman Tsani, and Muchamad Hartanto. 2021. "Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Dan Sumber Daya Wisata Pantai Kejawanan Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 2(2):94–117.

Hatton, Michael. J. 1999. *Community Based Tourism In The Asia-Pacific*. OPEC Publication.

Hidrawati, Hidrawati, Sumiman Udu, Abdul Manan, Sariamin Sahari, and Samsul Alam Fyka. 2020. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Perkampungan Wisata Sousu, Kabupaten Wakatobi)." *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian* 5(3):87.

Kementerian PPN/Bappenas. 2017. *Lembar Fakta SDGs*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Mendlinger, Samuel, Masaki MIYAKE, and Robert BILLINGTON. 2009. "The Perceptions of Small Business Owners on Tourism Development in the Blackstone Valley, Rhode Island." *Journal of Service Science and Management* 02(03):137–48.

Prasetyo, Andhika Eko, Paramita Setyaningrum, and Fandi Angga Prasetya. 2022. "Pengembangan Wisata Warakas Berbasis Edu Eco Wisata Sebagai Penunjang Kampung Bahari Nusantara." *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1(2):12–21.

Rahma, Adenisa Aulia. 2020. "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal Nasional Pariwisata* 12(1):1.

Rusyidi, Binahayati, and Muhammad Fedryansah. 2019. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1(3):155.

SDGs Indonesia. 2024. "Apa Itu SDGs?" *Https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/*. Retrieved (https://sdgs.bappenas.go.id/).

Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project,).

Suganda, Asep Dadan. 2018. "Konsep Wisata Berbasis Masyarakat." *I-Economic* IV(1).

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Grava Media.

Sutedjo, Agus, and Sri Murtini. 2023. "Buku Ajar Geografi Pariwisata." 1–166.

Triyanti, Riesti, Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, and Tommi Febrian. 2020. "Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif Di Kampung Malaumkarta , Papua Barat Potency Of Indigenous Community Based Marine Ecotourism Development As A Creative Economic Activity In Malaumkarta Village." *J. Sosek KP* 15(1):93–105.

UB, SDGs. 2023. "Ekosistem Laut." *Sdgs.Ub.Ac.Id*. Retrieved (https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-14-menjaga-ekosistem-laut/).

Wardaya, Wirya, Anjar Noer Hartanti, Diah Sukma Wardani, Yunila Putri, Solikhatun Nisa, and Melia Rofina Multatuli. 2022. "Inovasi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Studi Kasus Pada Kelurahan Sukolilo Baru Dan Kelurahan Kandangan Surabaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):152–56.

Wijaya, Andy Arya Maulana, Herman Lawelai, Anwar Sadat, Nastia Nastia, and L. M. Azhar Sa'ban. 2022. "Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pendekatan Pengembangan Pariwisata Desa Bahari III Kabupaten Buton Selatan." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6(1):436.